

ANALISIS KONFLIK TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKAN *THE CITIZENSHIP AMENDMENT BILL* DI INDIATAHUN 2019

Nur Mayda Rusmianti¹

Abstract

This study analyzes the conflict of the implementation of The Citizenship Amendment Bill 2019 Policy. The research method used in compiling this thesis is an explanatory type. The data collection techniques is literature studies or references related to the research topic. The type of data used is primary data in the form of law on The Citizenship Amendment Bill 2019 and secondary data sourced from research journals related to the topic of this research. In this study, the researcher used Simon Fisher's Theory of Onion Analysis. The results of this study indicate that conflicts occurred between the government and the society as well as the opposition parties regarding the implementation of The Citizenship Amendment Bill (CAB) 2019 Policy are based on the needs of each opposing party. The government through The CAB Policy wants the spread of Hindutva missions into politics in India as a country with the religion majority of Hindu and protecting Hindu, Buddhist, Christian, Jain, Parsi, and Sinkh minorities from Afghanistan, Pakistan, and Bangladesh by granting them with The Indian Citizenship Status. Meanwhile, the society and the oppositions consider that the policy has been contrary to the Indian constitution which upholds the principle of pluralism and wants the cancellation of the CAB Policy. The conflict arose from the response of the Indian society's refusal through demonstrations that occurred in many regions in India due to the implementation of the CAB Policy by the government.

Keywords: *Conflict, The Cizitenship Amendment Bill, India*

Pendahuluan

India secara geografis terletak di kawasan Asia Selatan (Sanjeev, n.d.: 30), memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia dengan populasi lebih dari satu miliar jiwa, India ditetapkan sebagai negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografisnya (Statista.com, diakses 7 Januari 2020). Dikenal dengan masyarakatnya yang heterogen, India menjadi salah satu negara paling beragam secara etnis atau suku, agama, dan bahasa. India memiliki 2.000 suku etnis, 7 agama, dan 23 bahasa yang diakui oleh pemerintah (Allam, n.d.: 10). Tetapi, untuk penetapan bahasa, pemerintah India menetapkan bahasa Hindi dan Inggris sebagai bahasa resmi negara. India adaah tempat berbaurnya berbagai kelompok etnis. Sedangkan, untuk urusan sistem kenegaraan, India memisahkan urusan agama dan pemerintahan atau dalam istilah lain disebut dengan sekuler (learnreligions.com, diakses 17 Januari 2021). Sehingga, untuk mengakomodir etnis atau suku, agama dan bahasa yang beragam, maka Pemerintah India melalui Kementerian Urusan Minoritas dan Komisi Nasional untuk minoritas menjamin hak-hak pemeluk agama, eksistensi agama serta mengurus berbagai etnis yang beragam. Pada Tahun 1955, Pemerintah India mengeluarkan kebijakan yang mengatur akuisisi dan penentuan kewarganegaraan India. Dalam undang-undang ini diatur siapa saja yang berhak menjadi warga negara India, baik itu warga negara atau

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nurmaydarusmianti@gmail.com

imigran *illegal* dengan memenuhi syarat; kewarganegaraan yang didapatkan sejak lahir, kewarganegaraan yang didapatkan berdasarkan keturunan, kewarganegaraan yang didapatkan dengan mendaftar ke *National Register of Citizenship* (NRC), kewarganegaraan yang didapatkan dari naturalisasi, dan kewarganegaraan yang didapat dari penggabungan wilayah.

Selama kurang lebih 64 tahun, India mengatur terkait aturan kewarganegaraan melalui Undang - Undang *The Citizenship Act 1955*. Dalam implementasinya, masyarakat India hidup berdampingan dengan perbedaan suku, ras dan agama yang dimiliki tanpa adanya konflik dan permasalahan lain yang memicu konflik. Kemudian pada tahun 2019, undang-undang kewarganegaraan *The Citizenship Act 1955* ini diamandemen oleh Dewan Negara (*Rajya Sabha*). Perdana Menteri India, Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janata (PBJ), mengusulkan perubahan undang- undang pada poin pengaturan imigran *illegal*. Pada poin ini ditambahkan beberapa persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh imigran *illegal* ketika hendak mendapatkan status kewarganegaraan India. Berikut letak penambahan redaksi undang-undang yang diamandemen dari kebijakan *The Citizenship Amendment Act 1955* menjadi *The Citizenship Amendment Bill 2019*.

Undang-undang *The Citizenship Act 1955* berbunyi:

"Migran Illegal" berarti orang asing yang masuk ke India-tanpa paspor yang sah atau dokumen perjalanan lainnya dan dokumen atau otoritas lain yang mungkin ditentukan oleh atau berdasarkan undang- undang apa pun atas nama itu; atau dengan paspor yang masih berlaku atau dokumen perjalanan lainnya dan dokumen atau otoritas lain yang mungkin ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang apa pun atas nama itu, tetapi tetap didalamnya melebihi jangka waktu yang diizinkan;"

Kemudian berubah menjadi *The Citizenship Amendment Bill* (CAB) 2019 yang berbunyi:

"Dalam undang-undang kewarganegaraan 1955 (selanjutnya disebut sebagai undang-undang utama), di bagian 2, di sub-bagian (1) dalam klausa (b), ketentuan berikut harus disisipkan, yaitu:

"Asalkan setiap orang yang tergabung dalam komunitas Hindu, Sinkh, Budha, Jain, Parsi atau Kristen dari Afghanistan, Bangladesh, atau Pakistan, yang masuk ke India pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2014 dan yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Pusat oleh atau dibawah klausul (c) dari sub-bagian (2) dari bagian 3 Undang-Undang paspor (Masuk ke India), 1920 dari penerapan ketentuan undang-undang orang asing, 1946 atau aturan atau perintah apa pun yang dibuat di dalamnya, tidak akan diperlakukan sebagai migran illegal untuk tujuan undang-undang ini"

Setelah perubahan kebijakan ini disahkan, maka menimbulkan reaksi protes dan kritik dari masyarakat. Demonstrasi dalam jumlah besar terjadi dan melibatkan aktivis politik, mahasiswa dan kelompok oposisi. Demonstrasi ini bermula di wilayah Assam dan meluas ke seluruh kota di India, seperti Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Jaipur, Kolkata dan Mumbai. Gelombang demonstrasi disusul juga di berbagai negara bagian India, seperti Benggala Barat, Punjab, Uttar Pradesh, Karnakata, Tamil Nadu, Gujarat, Telangana, Bihar, Maharastra, dan Kerala (cbc.ca, diakses 17 Januari 2021).

Aksi demonstrasi ini merupakan aksi dari pengesahan kebijakan *The Citizenship Amendment Bill 2019* yang dianggap bertentangan dengan perjanjian *Assam Accord* (Sangeeta BP, hal. 33-34). Perjanjian ini disepakati antara Pemerintah India yang dipimpin oleh Perdana Menteri Indira Gandhi dengan *All Assam Student Union* dan *All Assam Gana Sangram Parishad* pada tahun 1985. Dimana, *Assam Accord* ini merupakan perjanjian yang menyepakati tentang identifikasi imigran *illegal* yang menjadi warga negara, menghapus mereka dari daftar pemilihan umum, dan mengeluarkan mereka dari negara India jika mereka datang ke India setelah 25 Maret 1971. Artinya, imigran *illegal* yang memasuki wilayah India sebelum 25 Maret 1971 mereka akan mendapatkan status kewarganegaraan dan hak suara untuk memilih pada pemilihan umum.

Kebijakan *The Citizenship Amendment Bill 2019* yang diamandemen ini dianggap bertentangan dengan perjanjian *Assam Accord* karena pada kebijakan CAB 2019 diberikan penambahan aturan baru dimana siapa saja yang memasuki wilayah India sebelum 31 Desember 2014 dan berasal dari komunitas agama Hindu, Budha, Jain, Parsi, Sinkh, dan Kristen dari negara Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh akan mendapatkan status kewarganegaraan dan hak suara untuk memilih pada pemilihan umum (*Assam Accord.pdf*, diakses 15 Juli 2021).

Sederhananya, imigran *illegal* yang telah mendapatkan status kewarganegaraan dan hak suara pada pemilihan umum seperti yang disebutkan dalam perjanjian *Assam Acoord* kehilangan hak tersebut. Inilah yang menjadi dasar konflik antara Pemerintah India dan kelompok oposisi.

Melihat hal ini, Pemerintah India memberlakukan undang-undang pasal 144 sebagai upaya Pemerintah untuk mengurangi terjadinya kekerasan dan kerusakan *property public* selama demonstrasi berlangsung (Yolanda Friska, diakses 5 Maret 2021). Undang-undang ini merupakan larangan untuk sekelompok orang yang berkumpul di ruang public lebih dari 4 orang, jika hal ini tetapdilakukan maka tindakan ini akan dianggap sebagai pelanggaran hukum dan akan diproses secara hukum oleh aparat kepolisian setempat.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah India dalam meredam aksi demonstrasi semakin luas, yakni dengan memberlakukan pembatasan akses internet di seluruh wilayah India. Kemudian, dalam rangkaian *tweet*-nya Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan “*No India has anything to worry regarding this act. This act is only for those who have faced years of persecution outside aand have no other place to go except India*” yang artinya “tidak ada orang India yang perlu khawatir tentang

kebijakan ini, kebijakan ini hanya untuk mereka yang telah menghadapi penganiayaan bertahun-tahun di luar dan tidak punya tempat lain untuk pergi kecuali India”.

Kebijakan *The Citizenship Amendment Bill 2019* melanggar kesepakatan yang termaktub dalam *Assam Accord* yang awalnya disetujui oleh pemerintah India. Hal lain yang dikhawatirkan oleh kelompok demonstran adalah setiap migrasi dari negara Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh “tanpa memandang agama” akan menyebabkan hilangnya hak politik dan budaya masyarakat adat serta diskriminasi terhadap kaum muslim karena tidak sesuai dengan konstitusi dasar negara India yang sekuler.

Ketentuan di dalam undang – undang kewarganegaraan yang mengurus tentang imigran ini akan memberikan perlakuan yang berbeda antar kelompok berdasarkan negara asal imigran, agama, tanggal masuk ke India, dan tempat tinggal di India. Tak hanya itu, undang – undang *The Citizenship Amendment Bill 2019* ini juga melanggar standar kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi India pasal 14.

Kerangka Konseptual

Teori Analisis Situasi Konflik dengan Analogi Bawang Bombany Simon Fisher

Dalam memahami situasi konflik, tentunya akan ada berbagai macam perspektif yang akan digunakan untuk menjelaskannya. Setiap orang yang hidup ditengah – tengah masyarakat yang homogen akan berbeda cara pandangannya mengenai satu hal dengan orang yang hidup di masyarakat yang heterogen. Artinya, masing – masing orang akan memiliki nilai – nilai yang membuatnya berpikir, berperilaku, dan bertindak. Hal – hal ini dipengaruhi dari latar belakang yang dimiliki oleh masing – masing orang. Seperti, dilahirkan dari keluarga yang seperti apa, terlahir berjenis kelamin apa, dari lingkungan masyarakat yang seperti apa dll, inilah beberapa contoh yang akan mempengaruhi seseorang dalam memandang sesuatu hal didasari oleh perspektif yang dimiliki oleh masing – masing orang.

Sama halnya ketika seseorang memandang sesuatu hal dengan cara yang berbeda, begitu pula ketika kelompok masyarakat melihat situasi sosial dan politik dengan cara yang berbeda pula. Latar belakang dari masing – masing kita yang akan membuat kita menilai situasi sosial dan politik dengan cara yang berbeda pula. Tentunya, perbedaan sudut pandang ini tak dapat dihindari. Meskipun setiap orang dihadapkan dengan sebuah fakta yang sama, tetapi tak akan menjamin bahwa kesimpulan mengenai pandangan tentang situasi sosial dan politik menghasilkan satu analisis yang sama. Kenyataannya, analisis yang didapatkan akan memberikan hasil yang berbeda karena perbedaan cara pandang tadi. Tak hanya itu, ada indikator lain juga yang akan mempengaruhi cara seseorang memandang sesuatu yakni, status sosial, kekuasaan, kekayaan, usia, peran menurut *gender*, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial, dsb. Dalam situasi yang sama, indikator – indikator tadi akan menentukan keinginan kelompok yang berbeda. Ketika sasaran dan kepentingan yang diinginkan dari setiap kelompok berbeda, maka konflik tak akan terelakkan lagi.

Secara definisi, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran – sasaran yang tidak sejalan (Mitchell, 1981: 5). Ketika tujuan antar pihak yang berkonflik tidak sejalan, maka konflik dibutuhkan untuk menghasilkan situasi yang lebih baik lagi bagi semua

pihak yang berkonflik. Biasanya, konflik akan diselesaikan tanpa kekerasan. Oleh karena itu, konflik tetap berguna untuk menghasilkan sebuah harmonisasi dalam bermasyarakat, berkelompok, berorganisasi, bersosial, dan bernegara.

Ada beberapa pendekatan untuk mengelola konflik. Salah satunya adalah upaya dalam menyelesaikan konflik, tindakan dalam pencegahan konflik, dan penyebab terjadinya konflik (Fisher, 2000: 7). Dalam sebuah permasalahan yang lebih kompleks seperti konflik politik dan sosial, maka diperlukan sebuah strategi untuk menjelaskan situasi konflik yang sedang terjadi. Analisa konflik merupakan salah satu cara untuk memahami latar belakang dan sejarah dari situasi konflik yang sedang terjadi, mengidentifikasi kelompok yang terlibat dalam konflik, memahami pandangan semua kelompok yang berkonflik dan lebih mengetahui bagaimana hubungannya satu sama lain, mengidentifikasi faktor – faktor yang mendasari konflik, serta belajar dari kegagalan dan kesuksesan dari adanya sebuah konflik. Alat bantu analisis konflik biasanya digunakan secara fleksibel disesuaikan dengan kasus yang akan diteliti. Pada penelitian ini, penulis menggunakan alat bantu analisis konflik analogi Bawang Bombay (atau Donat). Hal ini dikarenakan penulis ingin melihat posisi dari masing – masing pihak yang sedang berkonflik, tujuan atau kepentingannya, dan kebutuhan yang diinginkan oleh masing – masing pihak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif. Data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder. Serta metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan *library research*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara metode *content analysis* yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, sehingga didapat analisa yang relevan atas permasalahan yang ada.

Hasil Penelitian

Struktur Sosial masyarakat di India.

India merupakan negara yang menjadi tempat berkembangnya agama Hindu. Kata Hindu sendiri berasal dari nama sungai Indus yang melewati wilayah India Awalnya, agama Hindu disebut dengan Sindhu yang artinya agama ini berkembang pertama kali di sungai Indus sekitar 6.000 tahun sebelum masehi. Dinobatkan sebagai agama tertua, akhirnya agama Hindu ini berkembang ke berbagai wilayah di dunia (Disbintalad, 1993: 11). Dalam ajaran Hindu, pembagian lapisan sosial yang dipengaruhi oleh sistem nilai sudah berlaku. Seperti utama, madya, dan nista (Andhika, 2010: 22). Kasta utama adalah kasta tertinggi dalam ajaran hindu yang disebut dengan golongan Brahmana. Biasanya, yang termasuk didalam golongan ini adalah para pendeta. Kasta berikutnya adalah kasta madya yang disebut dengan golongan Ksatrya. Biasanya, yang termasuk didalam golongan ini adalah para bangsawan, raja, prajurit, dan yang terakhir, adalah kasta nista yang disebut dengan golongan Waisya. Biasanya, yang termasuk di dalam golongan ini adalah para pengusaha dan pedagang. Selain tiga golongan ini, terdapat golongan yang paling rendah atau tidak berkasta yang disebut dengan golongan Sudra. Biasanya, yang termasuk didalam golongan ini adalah para hamba sahaya dan budak.

Masyarakat India, telah terbiasa dengan ajaran Hindu. Ajaran ini yang membuat

interaksi dalam kehidupan sehari – hari dan membentuk suatu pola hubungan saling mempengaruhi dengan prinsip klasifikasi masyarakat berdasarkan ajaran Hindu. Interaksi sosial yang terus – menerus terjadi, merupakan bagian dari proses sosial yang akhirnya menjadi budaya khas masyarakat India secara turun temurun. Memasuki masa kolonialisme di India, Inggris mengubah India menjadi negara yang modern (Sudipta, 2000: 152).

Sistem Pemerintahan India Masa Narendra Modi

India, memiliki sistem multi-partai. Artinya partai skala nasional dan partai skala negara bagian diakui sebagai partai resmi negara India. Partai nasional diperuntukkan sebagai wadah bagi calon Perdana Menteri, sedangkan partai negara bagian merupakan wadah bagi para calon pemimpin di negara bagian. Partai – partai ini diakui sebagai organisasi partai resmi, jika terdaftar di Komisi Pemilihan India atau (KPI). Untuk partai skala nasional hanya ada 6 partai yang diakui, diantaranya Partai Bharatiya Janata (PBJ), Kongres Nasional India (KNI), Partai Komunis India-Marxis (PKI-M), Partai Komunis India (PKI), Partai Bahujan Samaj (PBS), dan Partai Kongres Nasionalis (PKN). Sedangkan, untuk partai negara bagian ada lebih dari enam partai di setiap negara bagian yang diakui resmi sebagai organisasi partai dan terdaftar di KPU (eci.gov.in, diakses 1 Maret 2021).

Partai Bharatiya Janata, merupakan salah satu partai nasional di India. Dibentuk pada tahun 1980, partai ini disebut sebagai sayap politik pro – Hindu. Partai ini, sejak pertama kali berdiri memiliki visi untuk membangun India kembali sesuai dengan budaya Hindu dan membentuk negara kesatuan yang kuat. Partai Bharatiya Janata mengusung ide *Hindutva* atau sebuah ideologi yang berusaha untuk mendefinisikan budaya India dalam kerangka nilai – nilai Hindu (photius.com, diakses 1 Maret 2021). Partai ini, juga sangat kritis terhadap kebijakan dan praktek *Sekuler* dari Kongres Nasional India. Pada pemilu tahun 2014, Partai Bharatiya Janata memenangkan pemilihan umum parlemen dengan perolehan 282 kursi dari 543 kursi yang diperebutkan di Lok Sabha.

Pada pemilu parlemen 2014, Narendra Modi dipilih untuk memimpin kampanye pemilihan parlemen Partai Bharatiya Janata. Sebelumnya, Narendra Modi merupakan kepala pemerintahan negara bagian Gujarat. Berdasarkan *track record*-nya di dunia perpolitikan, Narendra Modi tidak hanya dipilih untuk memimpin kampanye, tetapi Narendra juga dijadikan sebagai calon perdana menteri dari Partai Bharatiya Janata. Narendra Modi memulai karir perpolitikannya pada tahun 1995 sebagai perancang strategi utama Partai Bharatiya Janata. Kemudian, tahun 2001 Narendra Modi menjabat sebagai Menteri Utama Gujarat sampai dengan 2014. Di tahun yang sama ketika pemilu parlemen berlangsung, Narendra Modi menjadi pemimpin kampanye dan memenangkan pemilu. Narendra Modi berhasil memenangkan pemilu parlemen dan menjadikan PBJ sebagai partai mayoritas di Lok Sabha (Ian Hall, 2017: 116).

Dalam dunia perpolitikan, Narendra Modi dikenal sebagai seorang nasionalis hindu dan anggota organisasi Rashtriya Swayamsewak Sangh (RSS). Sedangkan, dunia internasional mengenal Narendra Modi sebagai tokoh kontroversial karena digadagadag terlibat dalam kerusuhan Gujarat tahun 2002. Untuk mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap Narendra Modi, ia berupaya melakukan perubahan pada pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan perubahan yang signifikan di

bidang ekonomi (Pankaj, 2011: 26). Sejak tahun 2014, Partai Bharatiya Janata menguasai 282 kursi dari 543 kursi di Lok Sabha. Artinya, secara keseluruhan yang menguasai kursi di Lok Sabha adalah partai yang membawa misi *Hindutva* untuk negaranya. Kondisi ini akhirnya membuat eskalasi sosial, politik dan budaya di India berubah total. Arah dari perpolitikan yang berkuasa saat ini adalah fanatisme ajaran Hindu. Artinya, akan sangat mungkin kebijakan yang dikeluarkan akan menjadi condong ke salah satu komunitas tertentu.

Kondisi Imigran di India Tahun 2014-2019

Di India, istilah “pengungsi” tidak digunakan untuk seseorang yang merasakan ketakutan karna penganiayaan yang disebabkan oleh alasan ras, agama dan kebangsaan dari negara asalnya. Hal ini dikarenakan Pemerintah India tidak menyetujui Konvensi Pengungsi 1951. India hanya mengenal istilah imigran *legal* atau *illegal* untuk orang asing yang memasuki wilayah India baik yang memiliki dokumen yang sah, yang tidak memiliki dokumen dan yang masa berlaku dokumennya telah kadaluarsa.

Imigran *legal* yang telah diakui oleh Pemerintah India adalah imigran yang datang dari Tibet dan Srilanka. Mereka dianggap sebagai pengungsi dari masa lalu yang diberikan hak yang sama seperti warga negara dan diakui secara hukum di India.

Lalu, setelah pemberlakuan kebijakan CAB 2019 Pemerintah India mengakui pendatang dari komunitas agama minoritas agama Hindu, Budha, Sinkh, Jain, Parsi dan Kristen dari negara Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh sebagai imigran *legal* yang diakui secara hukum di India.

Melihat hal ini artinya imigran yang datang ke wilayah India dan melanggar kebijakan CAB 2019 akan dianggap sebagai imigran *illegal*. Mereka tidak memiliki hak hukum untuk tinggal di wilayah India dan akan dideportasi oleh Pemerintah India. Apabila ada orang asing yang memasuki wilayah India secara *illegal*, maka warga lokal India harus melaporkannya ke kantor polisi terdekat dalam waktu 24 jam setelah kehadiran mereka diketahui. Pemerintah India akan menahan orang asing tersebut sampai akhirnya mereka dideportasi ke negara asal mereka.

Jika merujuk pada aturan CAB 2019, syarat dalam mendapatkan kewarganegaraan India maka jumlah imigran harus melebihi satu juta jiwa namun hal ini berbanding terbalik dengan dengan penduduk imigran yang beragama muslim telah menjadi warga negara India sebelum CAB 2019 disahkan dimana jumlah imigran muslim lebih banyak dengan jumlah 200 juta jiwa jika dibandingkan dengan imigran dari agama lain, oleh karena itu kebijakan CAB 2019 akan membuat imigran muslim kehilangan kewarganegaraannya.

Adanya pemberlakuan kebijakan CAB 2019 menimbulkan masalah yakni imigran muslim yang kehilangan kewarganegaraannya akan menjadi *stateless*, mereka juga tidak dapat kembali ke negara asal akibat status mereka sebagai imigran. Pakistan, Bangladesh, Afganistan tidak akan menerima mereka sebagai warga negara dan ini menjadi kekhawatiran masyarakat internasional sebab jumlah imigran muslim yang mencapai angka 200 juta jiwa sehingga adanya kebijakan CAB 2019 telah dianggap sebagai tindakan diskriminatif karena tidak memikirkan adanya dampak dari pemberlakuan kebijakan yang merugikan imigran muslim.

Undang-Undang *The Citizenship Amendment Bill 2019*

Pada tahun 2016, Narendra Modi mengusulkan Rancangan Undang-Undang *The Citizenship Amendment Bill* yang merupakan amandemen dari kebijakan kewarganegaraan India tahun 1955 atau *The Citizenship Amendment Act 1955*. Kebijakan ini diusulkan untuk menambahkan syarat tertentu untuk mendapatkan status kewarganegaraan India (bbc.com, diakses 2 Maret 2021). Pada September 2015 dan Juli 2016, Pemerintah pusat membebaskan kelompok imigran untuk dipenjara atau dideportasi meskipun tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Aturan ini hanya berlaku bagi imigran yang datang ke India dari kelompok agama minoritas yakni Hindu, Jain, Parsi dan Kristen dari negara Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh sebelum 31 Desember 2014. RUU *The Citizenship Amendment Bill*, mengusulkan bahwa imigran yang datang ke India sebelum 31 Desember 2014, akan diperlakukan dan dianggap sebagai warga negara India sejak tanggal masuknya ke India (prsindia.org, diakses 2 Maret 2021). Semua proses hukum terkait status imigran yang kadaluarsa masa berlakunya akan ditutup. Kebijakan ini hanya akan berlaku bagi kelompok agama minoritas yakni Jain, Parsi, Hindu, Budha, Sinkh, dan Kristen dari negara Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh.

Pada Desember 2019, RUU *The Citizenship Amendment Bill* akhirnya disahkan menjadi Undang – Undang. Kejadian ini, memicu reaksi dari masyarakat, mahasiswa dan partai oposisi. Pemerintah pusat mencoba menjelaskan kepada masyarakat bahwa Undang – Undang ini ditujukan untuk kelompok minoritas yang melarikan diri dari penganiayaan dari negara muslim (thehindu.com, diakses 3 Maret 2021). Tetapi, hal ini bertentangan dengan bunyi UU *The Citizenship Amendment Bill* yang mengecualikan kelompok muslim didalamnya. Tidak hanya itu, UU *The Citizenship Amendment Bill* juga melanggar dasar konstitusi yang menganut ideologi sekuler. Sehingga, seharusnya India tidak diciptakan berdasarkan agama, tetapi atas dasar kebebasan dan menghargai kebebasan individu baik dari suku, agama dan ras. Pada dasarnya, ketika melihat keluaran dari kebijakan pemerintah India, maka keterkaitan antara sejarah filosofis ajaran Hindu di India, ajaran Inggris pada masa kolonialisme, dan Partai Bharatiya Janata membuat satu kesimpulan yang akhirnya menunjukkan bahwa keadaan sosial dan politik India lebih dominan kearah penguatan komunitas Hindu. Hal ini karena berjalan seiringan dengan misi yang dibawa Partai Bharatiya Janata, yaitu ingin menyebarkan ide – ide *Hindutva* ke seluruh wilayah India.

Analisis Konflik Terhadap Kebijakan *The Citizenship Amendment Bill 2019*

Kebijakan *The Citizenship Amendment Bill 2019* merupakan amandemen dari kebijakan *The Citizenship Act 1955* atau kebijakan yang mengatur tentang akuisisi dan penentuan kewarganegaraan India. Atas pengesahan dari kebijakan ini, konflik pun terjadi antara Pemerintah India, Partai Oposisi, dan Masyarakat India. Konflik ini terjadi karena Partai Oposisi dan masyarakat imigran yang telah lama menetap di India akan kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan kebijakan *The Citizenship Amendment Bill* Tahun 2019. Selain itu, disisi lainnya kebijakan ini dianggap mendiskriminasi kelompok agama tertentu, yang seharusnya berdasarkan konstitusi negara India, negara India dibangun berdasarkan prinsip *sekulerisme* dimana India mengakomodir kebebasan bagi masyarakatnya untuk memeluk agama apapun yang diyakininya.

Berdasarkan data, sejak tahun 2016 Partai Bharatiya Janata yang saat ini sedang berkuasa berhasil memenangkan pemilu dan menguasai kursi di Lok Sabha dengan jumlah 303 kursi (Hilal, 2020: 20). Artinya dari 552 kursi, sekitar lebih dari setengah kursi dikuasai oleh partai yang membawa misi *Hindutva* ini. Sedangkan, di Rajya Sabha ada sekitar 224 kursi dengan 75 kursi anggota Partai Bharatiya Janata dan 149 kursi lainnya diduduki oleh All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, Janata Dal, dan Biju Janata Dal. Dalam hal mengesahkan kebijakan *The Citizenship Act 2019*, Partai Bharatiya Janata berhasil mengamankan suara sekitar 125 suara yang mendukung amandemen kebijakan kewarganegaraan sedangkan hanya 99 suara yang menentang kebijakan baru ini. Pada saat yang sama, Partai Kongres Nasionalis dan Partai Bahujan Samaj tidak berpartisipasi dalam pembahasan dan pemungutan suara amandemen kebijakan kewarganegaraan India. Ketidakhadiran dua partai ini memungkinkan pemerintah untuk mengelola permainan angka dalam pemungutan suara dalam bahasan amandemen kewarganegaraan.

Berdasarkan hal inilah, arah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah India saat ini beraskan misi *Hindutva*, dimana kebijakan *The Citizenship Amendment Bill 2019* merupakan langkah awal Pemerintah dalam merealisasikan proyek jangka panjang tujuan politik pro-Hindu. Undang – Undang amandemen kewarganegaraan India Tahun 2019 ini, merupakan undang – undang yang disahkan oleh parlemen India yang kemudian menawarkan kewarganegaraan kepada komunitas agama Hindu, Budha, Jain, Parsi, Kristen dan Sinkh dari tiga negara tetangga yakni Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan. Menurut Pemerintah India, kebijakan yang dikeluarkannya merupakan upaya politik untuk merasionalisasi ide *Hindutva*-nya agar menjadi nilai nasionalisme India versi Partai Bharatiya Janata. Selain itu, ada sekitar 228 jiwa yang mengalami penganiayaan berdasarkan agama.

Sehingga, pada tahun 2015 sekitar 2.100 jiwa warga negara Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh dari komunitas agama Hindu, Budha, Kristen Jain dan Parsi bermigrasi ke India untuk mendapatkan suaka dari Pemerintah India. Untuk alasan kemanusiaan pula, Pemerintah India mengakomodir permintaan itu dengan mewujudkan undang – undang yang akan memungkinkan para imigran dari negara tetangganya mendapatkan status kewarganegaraan India. Disisi yang lain, menurut Partai Oposisi dan masyarakat India yang menolak amandemen kebijakan kewarganegaraan India Tahun 2019, tindakan Pemerintah India dianggap mendiskriminasi kelompok agama muslim yang mana seharusnya India berdiri atas konsep konstitusinya yang liberal bukan ntuk komunitas agama tertentu saja. Dikaji secara hukum, penyebutan agama dalam sebuah undang – undang di India masuk ke dalam kategori bermasalah karna bertentangan dengan prinsip sekuler yang termaktub di dalam konstitusi India sendiri.

Konflik ini terjadi akibat pengesahan amandemen kebijakan kewarganegaraan India Tahun 2019 antara dua kekuatan politik ideologis yakni Partai Bharatiya Janata dengan ideologi *Hindutva* dan Partai Oposisi dengan ideologi sekulerismenya. Isu konflik ini secara tegas dan *eksplisit* menunjukkan bahwa kontroversi atau perdebatan mengenai pengesahan amandemen kebijakan kewarganegaraan India Tahun 2019 menjadi isu yang berkenaan dengan isu politis dan tindakan diskriminasi yang dilegalkan atas nama kebijakan.

Konflik Masyarakat dan Pemerintah dalam Penerapan Kebijakan CAB 2019

India merupakan salah satu negara bekas jajahan Inggris yang terletak di Asia Selatan. Pada 26 Januari 1950, India merdeka dan berdiri sebagai negara federal berbentuk Republik (Kemlu.go.id, diakses pada 20 April 2021). Dasar konstitusinya adalah adil dalam bersosial; ekonomi dan politik, bebas dalam berpikir; berpendapat dan menganut kepercayaan, serta setara dalam kedudukan dan kesempatan dalam semua hal (wdl.org, diakses 21 April 2021). Secara tidak langsung, kebijakan *The Citizenship Amendment Bill* 2019 tidak mengindahkan konstitusi negara India sendiri. Dimana didalam isi kebijakan tersebut, mengkhususkan agama tertentu yang diberikan hak untuk menjadi warga negara. Sedangkan, di dalam konstitusi menyebutkan negara India harusnya mengkomodir kebebasan dalam hal menganut kepercayaan tertentu tanpa paksaan.

Konstitusi adalah sesuatu yang fundamental dimiliki di setiap negara. Seharusnya, dalam hal ini India mengeluarkan kebijakan yang selaras dengan konstitusi yang dimilikinya. Pada tahun 2019, dimana kebijakan *The Citizenship Amendment Bill* disahkan di parlemen, inilah yang menjadi momentum konflik yang terjadi di India. Pemerintah, masyarakat, partai oposisi dan kelompok pro-pemerintah mempunyai *statement* masing – masing dalam menyikapi dan meng-*interpretasi* kebijakan *The Citizenship Amendment Bill* 2019. Untuk memahami bagaimana Pemerintah India dan masyarakat bertindak, maka analisis bawang Bombay merupakan salah satu cara yang sesuai untuk menganalisis perbedaan pandangan tentang konflik dari pihak – pihak yang berkonflik.

Dalam situasi konflik, biasanya rasa ketidakpercayaan terjadi antara pihak yang berkonflik. Dalam hal ini Pemerintah India dan masyarakat India bersama partai oposisi, keduanya menyembunyikan kebutuhan – kebutuhan dasar yang diinginkan masing – masing pihak dalam menyikapi kebijakan *The Citizenship Amendment Bill* 2019. Hal ini dilakukan karena apabila kebutuhan – kebutuhan yang diinginkan oleh masing – masing pihak terungkap, maka hal ini akan menjadi keuntungan bagi pihak lawan yang berkonflik. Akhirnya, dalam situasi konflik tindakan yang dilakukan tidak akan secara langsung keluar dari kebutuhan mereka, melainkan datang dari sebuah anggapan sebuah kepentingan bersama oleh masing – masing pihak yang berkonflik.

Berdasarkan Analisis Bawang Bombay Simon Fisher, dapat dipahami bahwa kelompok masyarakat India dan partai oposisi mempunyai kebutuhan untuk diakui sebagai warga negara berdasarkan kebijakan akuisisi dan penentuan kewarganegaraan India atau *The Citizenship Act* 1955. Dalam aturan ini secara jelas mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan kewarganegaraan India. Syarat dalam kebijakan ini tidak bertentangan dengan konstitusi yang dimiliki oleh India, yakni: Kewarganegaraan yang didapatkan sejak lahir; Kewarganegaraan yang didapatkan berdasarkan keturunan; Kewarganegaraan yang didapatkan dengan mendaftar ke *National Register of Citizens (NRC)* atau Pusat Pencatatan Kewarganegaraan Nasional; Kewarganegaraan yang didapatkan dari naturalisasi; dan Kewarganegaraan yang didapat dari penggabungan wilayah.

Dalam teks Undang – Undang kewarganegaraan yang diamandemen tahun 2019, disebutkan tambahan persyaratan bagi imigran yang telah lama menetap di India, akan mendapatkan status sebagai kewarganegaraan apabila imigran ini berasal dari komunitas agama minoritas dari negara tetangga, seperti Hindu, Budha, Kristen, Jain,

Parsi dan Sinkh. Komunitas agama ini, akan diberikan status kewarganegaraan sebagai bentuk suaka yang dilakukan oleh Pemerintah India bagi komunitas agama minoritas dari negara tetangga, yakni Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh. Tujuan dari pemberian suaka ini adalah rasa kemanusiaan untuk melindungi kelompok minoritas yang kurang beruntung (Hindu, Budha, Kristen, Jain, Parsi dan Sinkh) dari negara mayoritas Muslim yakni (Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh). Dengan diberlakukannya kebijakan *The Citizenship Amendment Bill 2019*, maka janji politik Narendra Modi yang ingin menjadikan India sebagai “rumah” bagi kaum agama minoritas terwujud. Oleh karena itu, hal ini pun sejalan dengan ide yang diusung oleh Partai Bharatiya Janata yakni *Hindutva* atau sebuah ideologi yang berusaha untuk mendefinisikan budaya India dalam kerangka nilai – nilai Hindu.

Pada dasarnya, ketika melihat keluaran dari kebijakan pemerintah India, maka keterkaitan antara Partai Nasionalis Hindu (Partai Bharatiya Janata) dan Tokoh Nasionalis Hindu (Narendra Modi), maka terbentuklah satu kesimpulan yang akhirnya menunjukkan bahwa keluaran kebijakan India baik dalam sektor ekonomi, sosial dan politik berjalan seiringan dengan misi yang dibawa Partai Bharatiya Janata, yaitu ingin menyebarkan ide – ide *Hindutva* ke seluruh wilayah India. Tetapi, akibat dari Undang – Undang ini, imigran yang telah lama menetap di India sejak sebelum kemerdekaan India akan kehilangan kewarganegaraannya apabila mereka tidak berasal dari komunitas agama Hindu, Budha, Kristen, Jain, Parsi dan Sinkh. Ada sekitar dua juta imigran yang telah menjadi warga negara kehilangan kewarganegaraannya akibat dari syarat baru yang telah ditambahkan dalam Undang – Undang kewarganegaraan (paradigma.ui.ac.id, diakses 23 April 2021).

Sedangkan, disisi lain hal ini mendatangkan keuntungan bagi komunitas agama minoritas dari negara tetangga, yakni komunitas agama Hindu, Budha, Kristen, Jain, Parsi dan Sinkh. Sebanyak 1,9 juta imigran yang datang dari Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh telah mendapatkan status kewarganegaraan India dengan keistimewaan yang termaktub dalam UU kewarganegaraan. Hal ini menjadi sumber masalah, karena berdasarkan UU kewarganegaraan 1955, syarat untuk menjadi warga negara untuk imigran adalah imigran yang telah menetap di India atau imigran yang telah bekerja untuk pemerintah federal di India sekurang-kurangnya 11 tahun. Pemerintah India dengan menerapkan kebijakan CAB 2019 dengan tegas untuk melakukan upaya dalam melindungi kaum minoritas yang berasal dari Pakistan Afganistan dan Bangladesh

Artinya, berdasarkan UU kewarganegaraan yang telah diamandemen tahun 2019, imigran yang sebelumnya berstatus sebagai warga negara India secara langsung akan kehilangan status ini ketika mereka bukan berasal dari kaum agama minoritas. Fenomena inilah, yang disebut sebagai diskriminasi yang seharusnya tidak dilakukan oleh Pemerintah India, karena dasar dari negara India adalah sekulerisme yang mana telah termaktub dalam konstitusi negara India sejak merdeka.

Bagi masyarakat India, kebijakan CAB 2019 bukan hanya melakukan tindakan untuk mendiskriminasi tetapi juga akan membuat masyarakat India dapat kehilangan kewarganegaraannya dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan sosial mereka termasuk penggunaan kartu identitas NRC.

Untuk lapisan bawah Bombay kedua, yaitu kepentingan masyarakat India dan Partai Oposisi adalah untuk membatalkan kebijakan *The Citizenship Amendment Bill 2019* dan

mengembalikannya kepada aturan kewarganegaraan sebelum diamandemen tahun 1955 yakni *The Citizenship Act 1955*. Tetapi, karena Masyarakat India dan Partai Oposisi bukanlah institusi resmi pembuat kebijakan seperti Pemerintah, maka aksi yang mereka tunjukkan di muka umum adalah posisi mereka (Masyarakat India dan Partai Oposisi) yang menentang kebijakan *The Citizenship Amendment Bill 2019* dengan alasan utama yakni kebijakan ini dianggap mendiskriminasi agama muslim yang tidak dimasukkan kedalam syarat memperoleh kewarganegaraan bagi imigran yang datang ke India.

Kelompok yang kedua (Pemerintah India) juga memiliki kebutuhan untuk mengurangi jumlah imigran yang ada di India serta memberikan wadah bagi komunitas agama minoritas dari negara Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh untuk mendapatkan tempat yang lebih layak untuk ditinggali dengan mayoritas agama (Hindu, Budha, Kristen, Jain, Parsi dan Sinkh) dan juga menjadikan India sebagai *Base Hometown of Hinduism and Minority*. Kepentingan Pemerintah adalah kepentingan mayoritas Partai Bharatiya Janata yang sedang berkuasa dengan membawa misi *Hindutva* dengan keinginan untuk membentuk negara India sebagai sebuah negara dengan komunitas Hindu sebagai basis utamanya.

Posisi Pemerintah India yang ditunjukkan dimuka umum dalam penerapan kebijakan *The Citizenship Bill 2019* adalah sebuah kebijakan yang dibuat untuk melindungi kaum agama minoritas dari negara Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh yang dipersekusi karena agamanya di negara yang mayoritasnya adalah muslim. Pemerintah menghendaki India merupakan rumah bagi kaum agama minoritas yang dipersekusi. Jadi, berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bagaimana Pemerintah India dan Partai oposisi serta masyarakat India hanya mementingkan posisi masing – masing hingga akan sulit untuk mencapai sebuah titik temu untuk berdamai. Akibatnya, kebutuhan – kebutuhan mereka akan ada kemungkinan untuk tidak dapat terpenuhi bagi salah satu pihak. Karena, keduanya mempertahankan argumen dan posisi masing – masing sehingga sulit mencapai sebuah kesepakatan bersama untuk mencari jalan tengah dari konflik yang terjadi. Apabila tidak ada upaya dari masing – masing pihak untuk berusaha memenuhi kebutuhan pihak lainnya maka upaya negosiasi untuk penyelesaian konflik tidak akan terjadi.

Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan CAB 2019

Setelah kebijakan *The Citizenship Amendment Bill 2019* diberlakukan, maka protes terjadi hampir di seluruh wilayah di India. Demonstrasi terjadi secara massif dan bentrokan yang terjadi antara pengunjung rasa dan kepolisian setempat terjadi selama berbulan – bulan. Protes ini dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa dan kelompok oposisi. Bahkan beberapa pegawai negeri mengundurkan diri akibat merasa tertekan dengan kebijakan yang baru diberlakukan di seluruh wilayah India tersebut. Dimulai pada 4 Desember 2019, setelah RUU *The Citizenship Amendment Bill* diajukan ke parlemen, aksi unjuk rasa sudah dimulai. Berawal dari wilayah Assam dan Guwahati, beberapa hari kemudian aksi unjuk rasa meluas ke seluruh wilayah kota metropolitan di India, seperti Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, dan Mumbai. Disusul aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Gauhati, ITT Bombay, Universitas Presidensi, Universitas Dekhi, Universitas Panjab, Jamia Milia Islamia, Universitas Osmania, dan Universitas Muslim Aligarh (tirto.id, diakses 4 Maret 2021).

Kelompok oposisi, seperti Partai Komunis India, Partai Kongres Nasional India,

Dravida Munnetra Kazhagam, Liga Muslim India, dll mengatakan bahwa kebijakan *The Citizenship Amendment Bill 2019* melanggar prinsip sekuler yang menaungi konstitusi India, dimana harusnya melarang diskriminasi agama terhadap warga negara dan menjamin semua orang sama dihadapan hukum (theweek.com, diakses 4 Maret 2021). Sehingga, agama dan kepercayaan seharusnya tidak boleh dijadikan syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan. Pemerintah India melihat hal ini tidak tinggal diam. Pemerintah menutup akses internet agar demonstrasi tidak meluas ke wilayah lain dan memprovokasi warga negara lainnya. Selain itu, pemerintah India juga memberlakukan jam malam, yang artinya tidak ada kerumunan orang yang diizinkan berkeliaran diatas jam 10.00 malam (indiatoday.in, diakses 4 Maret 2021).

Di negara bagian Assam, terjadi aksi unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan. Setidaknya ada dua orang tewas akibat aksi yang dilakukan oleh masyarakat India ini. Bangunan dan stasiun kereta api dibakar. Tindakan ini merupakan reaksi dari amarah masyarakat karena Undang – Undang *The Citizenship Amendment Bill 2019* akan memungkinkan ribuan imigran dari komunitas agama yang telah ditentukan, dapat dengan mudah menjadi warga negara India (reuters.com, diakses 5 Maret 2021). Hal ini akan mempengaruhi lingkungan politik dan budaya di India. Artinya, budaya asli yang dimiliki oleh India akan memudar dan diwarnai dengan budaya lain yang dimiliki oleh imigran pendatang di India. Alasan dasar inilah, yang membuat masyarakat India dan mahasiswa berjuang untuk menolak kebijakan *The Citizenship Amendment Bill 2019*.

Selain itu, pelayanan transportasi umum di India sebagian besar ditutup. Contohnya, layanan kereta api dan maskapai penerbangan membatalkan jadwal penerbangan dengan menawarkan biaya ganti rugi akibat pembatalan penerbangan secara sepihak yang dilakukan oleh maskapai (bbc.com, diakses 16 April 2021). Pada 15 Desember, polisi secara paksa menyerbu Universitas Jamia Milia Islamia, dimana tempat aksi demonstrasi oleh mahasiswa terjadi. Pasukan kepolisian menahan para mahasiswa dengan menyerbu mahasiswa menggunakan pentungan dan gas air mata (merdeka.com, diakses 16 April 2021).

Pada 16 Desember, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa sudah memasuki hari kelima. Perdana Menteri India, yakni Narendra Modi meminta semua pihak untuk tetap tenang dengan membuat kicauan *tweet* melalui *twitter official* miliknya, dengan mengatakan bahwa UU *The Citizenship Amendment Bill 2019*, hanyalah Undang – Undang yang diperuntukkan untuk mereka yang telah menghadapi persekusi agama selama bertahun – tahun dari negara tetangga yakni Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh.

Akibat dari kekacauan yang terjadi di India, ada beberapa kegiatan yang terpaksa dibatalkan. Diantaranya, KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) India – Jepang di Guwahati, yang sebelumnya dijadwalkan akan dihadiri oleh Shinzo Abe, tetapi dibatalkan karena alasan keselamatan, dikhawatirkan kekacauan yang tengah terjadi di India akan memicu bahaya untuk Shinzo Abe selama di India, oleh karenanya pembatalan ini diinformasikan oleh Jepang sehari sebelum kegiatan KTT berlangsung di Guwahati, India (thehindu.com, diakses 16 April 2021).

Di tengah situasi yang kacau, warga negara India yang beragama muslim memberikan

reaksi juga, terkait pengesahan amandemen kebijakan kewarganegaraan India Tahun 2019. Mereka mengutarakan pentingnya aktivitas politik dikembalikan kepada konstitusi negara India sendiri. Pengunjuk rasa menerapkan model pernyataan aspirasi dari politik akar rumput dan gerakan rakyat, dimana gerakan ini diharapkan dapat melawan sebuah kebijakan yang telah diterapkan melalui masyarakat yang dijadikan dasar untuk pergerakan politik. Pada dasarnya, konstitusi adalah sumber politik yang sah untuk menegaskan status kewarganegaraan di India. Nilai – nilai liberal dan sekuler secara jelas termaktub di dalam konstitusi yang artinya klasifikasi berdasarkan kelompok agama tertentu adalah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi atau dasar negara India sendiri.

Kesimpulan

Dampak penerapan kebijakan *The Citizenship Amendment Bill* Tahun 2019, adalah konflik yang terjadi antara Pemerintah India dan Partai Oposisi serta masyarakat India. Pemerintah dalam hal ini memiliki posisi yang lebih kuat secara status sosial yakni lembaga negara yang membuat kebijakan. Sedangkan, masyarakat India dan partai oposisi berposisi sebagai penjalan kebijakan. Akhirnya, ketika Pemerintah India hendak menerapkan kebijakan *The Citizenship Amendment Bill* Tahun 2019, karena kepentingan Modi untuk menepati janji politiknya yakni memberikan rumah bagi kaum agama minoritas di negara Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh.

Tetapi, disisi lain masyarakat India dan partai oposisi menolak kebijakan ini karena kepentingan masyarakat India tidak sepenuhnya terakomodir, seperti hilangnya kewarganegaraan imigran muslim yang telah menetap lama di India. Akhirnya inilah yang menyebabkan konflik diantara keduanya. Ketika tidak ada titik temu penyelesaian diantara keduanya, maka kebutuhan masing – masing tidak terpenuhi. Pemerintah India berkebutuhan untuk menyebarkan misi *Hindutva* ke dalam bagian perpolitikan di India, serta ingin menjadikan India sebagai *Base Hometown of Hinduism and Minority*. Sedangkan, Masyarakat India yang dulunya statusnya adalah imigran berkebutuhan untuk diakui kewarganegaraannya, serta masyarakat imigran ini berharap status kewarganegaraannya tidak dicabut hanya karena agama yang dianut, bukan dari yang dipersyaratkan dalam kebijakan *The Citizenship Amendment Bill* Tahun 2019. Karena jika hal ini terus – menerus terjadi, ini artinya Pemerintah India membiarkan praktek diskriminasi menjadi sesuatu yang legal di India.

Daftar Pustaka

Buku

Allam, Muhammad, _____, *Indian minorities in Higher Education*, Miskat Printers and Publishers, Aligarh.

Fisher, Simon, 2000, *Mengelola Konflik (Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak)*, The British Council.

Hilal, Ahmed, 2020, *Making Sense of India's Citizenship Amedment Act 2019 Process, Politics, Protests*, Center of Asian Studies, India.

Ian, Hall, 2017, *Narendra Modi and India's Normative Power*, International Affairs.

Mitchell, Chris, 1981, *The Structure of International Conflict*, Macmillan, London.

Pankaj, Mishra, 2011, *Perspectives on Modern South Asia: A Reader in Culture, History, and Representation*, Visweswaran Kamala Publishers.

S., Sanjeev, _____, *The Incredibile History of India's Geoghrapy*, Penguin Books Ltd.

Sudipta, Kaviraj, 2000, *The Invention of Private Life: Literature and ideas*, Columbia University Press, United States.

Skripsi

Andhika, Pratiwi, 2010, *Dinamika Krisis Identitas Barat – Timur dalam The Inheritance of Loss karya Kiran Desai*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.

Internet

@narendramodi, tersedia di <https://twitter.com/narendramodi/status/1206492850378002432?s+1=19>.

Ahmed Aftab dan Sankalp Phartiyal, tersedia di <https://www.reuters.com/article/us-india-citizenship-protests/india-citizenship-law-protests-spread-across-campus-es-idUSKBN1YK0DD>.

All about the Citizenship (Amendment) Bill, 2019 tersedia di <https://www.thehindu.com/news/national/the-citizenship-amendment-bill-2019video/article30247610.ece>.

Atlanta Journal Constitution, tersedia di <https://theweek.com/5things/972454/suspect-atlanta-shootings-charged-murder>.

Citizenship Amendment Bill : India's new 'anti-Muslim' law explained, tersedia di <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50670393>.

Citizenship Amendment Bill : Two dead as violence intensifies in Assam and Tripura, tersedia di <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50754065>.

Delhi Riots: Death Toll Rises to 42, 148 FIRs Registered, tersedia di <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/delhi-riots-death-toll-rises-to-42-148-firs-registered/articleshow/74410677.cms>.

Demo Anti UU Kewarganegaraan Meluas, Polisi India Serbu Kampus dan Pukuli Mahasiswa, tersedia di <https://www.merdeka.com/dunia/demo-anti-uu-kewarganegaran-meluas-polisi-india-serbu-kampus-dan-pukuli-mahasiswa.html>.

Election Commission of India, tersedia di https://eci.gov.in/eci_main/ElectoralLaws/OrdersNotifications/year2014/EnglishNotification_12032014.pdf.

Explainer: The Citizenship (Amendment) Bill 2019, tersedia di <https://www.prsindia.org/theprsblog/explainer-citizenship-amendment-bill-2019>.

India Citizenship Law Protests, tersedia di <https://www.cbc.ca/news/india-citizenship-law-protests-1.5397915>.

India – Japan Giwahati Summit Cancelled in View of Protests”, tersedia di <https://www.thehindu.com/news/international/india-japan-guwahati-summit-cancelled/article30294202.ece>.

Migrasi, Kewarganegaraan dan Partisipasi Politik Imigran, tersedia di <http://paradigma.ui.ac.id/index.php/paradigma/article/download/162/pdf>.

Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia, tersedia di <https://kemlu.go.id/mumbai/en/read/india/1078/etc-menu>.

Nath Hemanta Kumar, tersedia di <https://www.indiatoday.in/india/story/anti-citizenship-amendment-bill-assam-protest-1627464-2019-12-11>.

Organiser ‘Call of’ Shaheen Bagh Anti – CAA Protest, Locals Continue Dharna, tersedia di <https://thewire.in/rights/shaheen-bagh-anti-caa-protest>.

Photius Coutsoukis, tersedia di https://www.photius.com/countries/india/government/india_government_the_rise_and_decline~150.html.

Polisi India Larang Unjuk Rasa UU Kewarganegaraan, tersedia di <https://internasional.republika.co.id/berita/q2qylf370/polisi-india-larang-unjuk-rasa-uu-kewarganegaraan>.

Portraits of Resilience: The New Year in Shaheen Bagh, tersedia di <https://www.livemint.com/mint-lounge/features/portraits-of-resilience-the-new-year-in-shaheen-bagh-11577952208794.html>.

Secularism 101 History Nature Importance of Secularism, tersedia di <https://www.learnreligions.com/secularism-101-history-nature-importance-of-secularism-250876?terms=go>.

The 30 Largest Countries in the World by Total Area, <https://www.statista.com/statistics/262955/largest-countries-in-the-world/>.

Title: The Constitution of India, tersedia di <https://www.wdl.org/en/item/2672/view/1/16/>.

Sumber lain

Disbintalad, Binroh Hinbud, 1993, *Pokok – pokok Ajaran Hindu Dharma*, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Dinas Pembinaan Mental, Jakarta.